

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di kalangan auditor, kecurangan (fraud) adalah istilah yang sudah lama dikenal. Kecurangan adalah ketika sumber daya organisasi digunakan secara sengaja dengan cara yang tidak sesuai serta menyembunyikan fakta untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa bentuk kecurangan yang dapat terjadi meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, serta manipulasi laporan keuangan (BPKP, 2004).

Association of Certified Fraud Examiners (2020) menyatakan bahwa kecurangan merupakan masalah global yang mempengaruhi semua organisasi di seluruh dunia. Menurut data *Absence of Corruption* dalam *World Justice Project Rule of Law Index* (2020), Indonesia menempati posisi 92 dari 128 negara dengan indeks 0,39 dari interval 0-1 (lampiran 04) yang mana juga berada di bawah rata-rata global, yaitu sebesar 0,52. Ini membuktikan bahwa tingkat kecurangan yang terjadi di Indonesia tergolong cukup tinggi. Meskipun demikian, indeks tingkat keabsenan terhadap korupsi di Indonesia di tahun 2020 telah meningkat dari sebelumnya di tahun 2015 dengan indeks sebesar 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kecurangan merupakan tindakan yang melawan hukum telah meningkat. *Indonesia Corruption Watch* dalam situs Kompas.com (edisi September 2020) juga mengungkapkan pada semester I-2020 terjadi penurunan jumlah kasus penanganan korupsi dari tahun 2019 adalah sebesar 271 menjadi 169 kasus. Masih banyaknya kecurangan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh aktivitas pengendalian yang kurang.

Pada umumnya, setiap organisasi baik formal maupun informal dalam menjalankan fungsi-fungsinya memerlukan sebuah pengawasan dan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi. Pengendalian merupakan suatu proses penjaminan pelaksanaan setiap komponen dalam kegiatan keorganisasian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soleman (2013), menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sebuah bentuk pengendalian yang diperoleh dari sebuah struktur yang terorganisir, yang bermanfaat bagi para pemimpin dalam merancang laporan keuangan, mencegah kecurangan, maupun mengamankan harta organisasi. Sasaran dari sistem pengendalian internal adalah untuk melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan juga kehandalan pelaporan, keefesienan dan keefektivan proses operasional, dan evaluasi kebijakan serta aturan yang ada. Wilkinson dkk. (1996) menyatakan bahwasanya: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.”. Hal ini berarti kemungkinan kecurangan dapat dikurangi melalui pengendalian internal yang efektif.

Pengendalian internal menjadi penting untuk dilaksanakan bukan hanya pada organisasi nirlaba dan organisasi yang berorientasi pada laba. Adanya perkembangan teknologi dan pengetahuan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja baik untuk organisasi nirlaba maupun organisasi yang menghasilkan keuntungan standar kontrol terhadap keuangan maupun organisasi agar lebih terarah dan terstruktur serta dapat mencegah kekeliruan hingga menemukan masalah-masalah yang terjadi.

Lembaga keagamaan adalah salah satu contoh organisasi non-profit yang

tidak berfokus pada keuntungan finansial. Organisasi ini mengumpulkan dana dari anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan pembayaran dari organisasi. Organisasi keagamaan dipimpin oleh pemuka agama yang diakui sebagai orang yang memiliki iman yang lebih prihal kepercayaan dan juga dianggap “suci” oleh masyarakat. Presepsi inilah yang dipercayai masyarakat bahwa pemuka agama tidak mungkin melakukan kecurangan. Namun, pada kenyataannya, menurut hasil survei Transparency International Indonesia (TII), selain menjadikan anggota legislatif sebagai lembaga dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia, ternyata sebanyak 7% Pemuka Agama tersandung kasus korupsi (HanTer edisi Desember 2020). Sementara itu, lembaga atau institusi terkorup lainnya menurut TII adalah “Pejabat Pemerintah Daerah (48 persen), Pejabat Pemerintahan (45 persen), Polisi (33 persen), Pebisnis (25 persen), Hakim/Pengadilan (24 persen), Presiden/Menteri (20 persen), LSM (19 persen), Bankir (17 persen), dan TNI (8 persen)”.

Kenyataan akan data ini menjadi pukulan bagi organisasi keagamaan. Hal ini akan memberikan kesan kurang baik terhadap pemuka agama, dimana para pemuka agama yang seharusnya memberikan contoh yang baik, masih dapat tersandung kasus korupsi. Munculnya tidakan kecurangan ini dapat disebabkan oleh adanya peluang, tekanan, dan rasionalisasi.

Salah satu contoh lembaga keagamaan adalah gereja. Gereja merupakan sebuah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang sosial. Gereja memperoleh sumber dana dari persembahan/kurban dan dana sosial yang mengakibatkan gereja harus menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengendalian akan pelaporan keuangan pada gereja masih

kurang efektif terlaksana dikarenakan jemaat mempercayakan sepenuhnya kepada pengurus gereja untuk mengelola persembahan tanpa perlu mempertanyakannya kembali. Selain itu, jemaat diyakinkan bahwa gereja adalah lembaga yang dianggap sakral dan suci, sehingga dapat mengelola sumber dayanya dengan efektif (Wibowo dan Kristanto, 2017). Hal ini didasarkan pada pemahaman akan Kitab Injil Matius 6:1-4 dimana dalam hal memberi sedekah, hendaknya tidak perlu diungkapkan kepada orang lain agar tidak terungkap dalam perangkap dosa. Hasil survei Keller dan Owens, LLC (2015) juga menyatakan bahwa data pengendalian internal di banyak gereja masih lemah dan tidak lengkap. Survei tersebut dilaporkan oleh salah satu akuntan publik yang melayani khususnya gereja.

Penelitian sebelumnya oleh Tular (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terkait kas pada GMIM IMANUEL LOLAH masih lemah. Di mana sistem pemasukan dan pengeluaran keuangan dilaksanakan hanya melalui satu pintu sehingga dinilai mengkhawatirkan. Lintang (2017), menyatakan bahwa Pengawasan internal terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan elemen kontrol menurut COSO dinilai masih belum memadai, sehingga dikategorikan lemah. Prabowo dan Kurniasih (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal untuk penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan komponen kontrol menurut COSO di Gereja Kristen Jawa Wedi belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sementara itu, Ta'dung dan rekan-rekan (2023) menyebutkan bahwa "Gereja Toraja Jemaat Rantepangli memiliki sistem pengendalian internal yang cukup memadai, termasuk dalam manajemen keuangan, proses verifikasi, dan prosedur yang sesuai dengan pedoman umum BPS Gereja Toraja".

Lemahnya tingkat mengendalikan internal dapat mengakibatkan tidak terjaminnya keamanan kekayaan organisasi, pengelolaan operasional organisasi juga dapat menjadi tidak efektif dan efisien, kurangnya keandalan laporan keuangan dan ketidakmampuan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pada Alkitab, kontrol internal telah dicontohkan melalui peristiwa pengiriman dana bantuan dari Korintus ke Yerusalem yang disertai oleh seorang pengawas untuk membuktikan kejujurannya (2 Korintus 8:18-22). Terlebih lagi, Yesus menegaskan pentingnya pengendalian internal melalui ilustrasi yang tertulis pada Injil Lukas 16:1-13 dimana apabila pengendalian internal yang dilakukan lemah adanya akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan yang merupakan salah satu organisasi nirlaba di bidang keagamaan yang ada di Singaraja. Sumber daya yang diperlukan gereja untuk menjalankan operasinya dapat mengeloah penerimaan serta pengeluaran kas yang meliputi investasi, operasional, biaya perjalanan dan akomodasi, pemeliharaan fasilitas gereja, pembangunan dan perawatan fisik dan berbagai bentuk kegiatan gereja lainnya. Perlunya pengelolaan secara baik dan benar terhadap aktivitas akuntansi tersebut dapat menjadikan pengeluaran yang digunakan menjadi tepat sasaran untuk pelayanan umat.

Meskipun dalam praktiknya, Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan telah menjalankan fungsi organisasi dengan baik, namun, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masih ada masalah. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola melalui pengawasan internal memiliki beberapa aspek yang tidak sesuai dengan teori sistem pengendalian internal yang berlaku terkait informasi akuntansi. Meski demikian, hal ini telah

disesuaikan dengan kondisi internal gereja, di mana otoritas dan nomor bukti tidak dicetak belum dipisahkan dengan jelas. Tegas yang dimaksud, yaitu kepengurusan gereja dipilih secara sukarela tanpa memikirkan latar belakang individu. Di samping itu, pernah terjadinya penyelewengan kekuasaan juga menjadi pukulan bagi organisasi ini sendiri. Sehingga, perlu adanya pengawasan mendalam agar tujuan organisasi dapat tercapai. Alasan lain penulis memilih objek tersebut dikarenakan dalam kegiatan pelayanannya, organisasi ini bertindak secara sukarela. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan. Selain itu, perlunya pengendalian internal pada organisasi termasuk gereja bukan hanya karena telah terjadi penyelewengan saja, melainkan dapat menjadi suatu upaya pencegahan atau perlindungan terhadap seluruh aset yang dimiliki.

Berdasarkan pemasalahan yang terjadi serta pentingnya pengendalian internal pada organisasi keagamaan, yaitu gereja, timbullah niat peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pengendalian internal terhadap kas masuk dan keluar di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan yang juga akibat dari pengendalian ini dapat menjadikan suatu upaya dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam organisasi gereja. Kas diambil karena sifatnya cukup mudah dialihkan dan tidak dapat diverifikasi kepemilikannya, sehingga apabila tidak diberikan perhatian yang khusus maka akan sangat rentan terjadi penyelewengan dan kecurangan. Terlebih lagi, adanya pengendalian internal yang baik terhadap kas dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelola gereja terhadap jemaat dan para kepentingan lainnya. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul: “Analisis Penegendalian Internal dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Indeks keabsenan terhadap fraud di Indonesia masih tergolong rendah, dan berada dibawah rata-rata global, namun telah meningkat dibandingkan tahun 2019.
2. Kecurangan juga terjadi pada Pemuka Agama.
3. Pengendalian internal dinilai penting bahkan dalam organisasi keagamaan

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah yang terjadi pada tingkat kecurangan serta pengendalian internal maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tingkat pengendalian internal kas, yang meliputi mengumpulkan dan membelanjakan uang di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan yang juga sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan kecurangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan?
2. Bagaimana implikasi dari adanya pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dapat menjamin pencegahan terhadap kecurangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk memperoleh temuan yang teruji tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Sambangan.
2. Untuk mengetahui implikasi dari adanya pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dapat menjamin pencegahan terhadap kecurangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi manajemen, tentang pengendalian internal kas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami informasi bagi gereja khususnya dalam pengelolaan keuangan.

